

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan ialah suatu usaha sadar dan terencana untuk dapat menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan potensi diri dari peserta didik secara aktif dikembangkan, mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengontrolan diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan yang dapat berguna bagi dirinya serta masyarakat.

Pendidikan merupakan kebutuhan paling dasar bagi setiap orang. Tentunya dengan pendidikan akan mengubah kehidupan manusia dalam berbagai bidang, melalui pendidikan diperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang dapat menjadi bekal bagi manusia untuk kehidupan dan masyarakat masa depan. Begitu pendidikan ditekankan, lembaga pendidikan harus dengan sendirinya dalam meningkatkan kualitas, termasuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kualitas fisik sekolah, dan kualitas manajemen sekolah (Ismail, 2018). Lembaga pendidikan harus selalu bergerak maju untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan di semua jenjang. Suatu pendidikan dapat dikatakan bermutu tinggi apabila pendidikan atau keluaran lulusannya memiliki kompetensi yang diambil sesuai dengan kompetensi kerja. Tidak hanya kompetensi profesional, diharapkan juga mempunyai kompetensi pribadi, sosial, akademik serta moral.

Pendidikan yang bermutu merupakan suatu pendidikan yang dapat menghasilkan setiap lulusan yang cakap secara akademis, jujur, sosial dan pribadi, serta memiliki karakter yang tinggi, lima kompetensi yang dapat disebut kecakapan hidup (Sudrajat, 2014). Manusia dapat dikatakan mampu jika dapat memasukkan kelima kemampuan yang dimilikinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Manusia mampu mengintegrasikan pengetahuan, keyakinan, dan praktik ke dalam semua aktivitasnya untuk menciptakan harmoni dan kualitas hidup. Mutu di bidang pendidikan mencakup mutu input, proses, output dan outcome. Dinyatakan layak jika input pendidikan sudah siap untuk diolah. Proses pendidikan yang bermutu jika tercipta suasana belajar yang positif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Jika hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi, maka menyatakan output tersebut memenuhi syarat. Outcome dinyatakan berkualitas ketika lulusan cepat terintegrasi ke dunia kerja, dibayar wajar, serta diakui oleh semua pihak sebagai hebat dan puas dengan kinerja lulusannya (Usman, 2014).

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai dengan diberikannya otonomi daerah yang luas (UU No. 22 Tahun 1999), yang memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai bagian dari otonomi daerah, sebagai wujud keikutsertaan masyarakat di dalam bidang pendidikan, perlu adanya tempat yang dapat menampung pendapat, aspirasi, serta menjamin potensi masyarakat dapat terciptanya kemandirian pendidikan. demokratisasi, akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pendidikan.

Desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari kebutuhan pendidikan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang diberikan berkaitan dengan keperluan serta pembangunan kehidupan. Seperti yang dikatakan E. Mulyasa, Relevansi pendidikan menjadi suatu isu utama dalam pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, sejak Pelita I (sejak berdirinya pemerintahan Suharto), berbagai program pendidikan telah dilakukan seputar topik terkait ini, namun masih besar persoalan serta tantangan yang memerlukan perhatian. Beberapa masalah dalam pendidikan yang memiliki kaitan dengan relevansi ialah memerlukan materi di dalam program pendidikan yang sesuai agar peningkatan secara fleksibel beralih dengan cepat searah oleh tuntutan dalam dunia kerja ataupun tuntutan kehidupan di masyarakat yang secara berkepanjangan dapat berubah (Mulyasa, 2005). Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan bentuk desentralisasi yang secara langsung memelopori pendidikan di bidang ini. Sekolah harus berperan nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kepada kantor perwakilan dinas pendidikan kecamatan serta dinas pendidikan kabupaten/kota yang berperan selaku fasilitatif dalam proses mengarahkan, memantau, serta mengevaluasi. Hal tersebut disebabkan proses interaksi sekolah dan pendidikan merupakan jantung sebenarnya dari proses pendidikan. Dengan demikian, gambaran paling dasar dari desentralisasi pendidikan dilakukan oleh sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan, dan sebagai wadah pergeseran nilai dan keseimbangan moral kepada peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran, sekolah dituntut untuk berupaya berinovasi meningkatkan mutu pendidikan guna meningkatkan mutu lembaga di seluruh tanah air.

Suatu program pendidikan yang berjalan harus mengutamakan seluruh aspek pelaksanaan komponen pendidikan, termasuk pengembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan, sekolah menengah pertama (SMP) memegang peranan penting dalam mendukung sistem pendidikan nasional sebagai bagian setelah pendidikan dasar peserta didik. Sekolah sebagai pusat penyelenggara pendidikan berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang sehingga dihasilkan output sumber daya yang berkualitas (Adha, Benjamin, Octaviarnis & Thalib, 2019).

Keberhasilan seorang siswa bukan hanya hasil dari faktor sekolah, tetapi kombinasi dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Berg (2006) menjelaskan kemitraan antara sekolah, keluarga dan masyarakat bisa mengarah pada solusi yang kreatif dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa. Dengan demikian, adanya mereka dapat mengemban misi membangun manusia serta ekosistem pendidikan yang bercirikan budaya dan gotong royong. Dengan konteks ini, Bryan & Henry (2012) mengusulkan ketika pemangku kepentingan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) ikut berkontribusi dalam membangun kemitraan, ada dampak positif pada prestasi dan disiplin siswa. Sehingga diharapkan kerjasama pendidikan bisa tercapai dengan baik dan bermakna.

Peran masyarakat serta orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dicapai dengan suatu badan yang disebut Komite Sekolah. Dibentuknya Komite sekolah ialah menjadi sebuah tempat bagi masyarakat yang peduli akan pendidikan. Adanya Dewan Pendidikan dan Dewan Sekolah mengarah pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, sebagai implementasinya telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 044/U Menteri Pendidikan Negara tanggal 2 April 2002 mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Bersumber dalam Keputusan Menteri Pembelajaran Nasional No 044/ U/ 2002, komite sekolah ialah badan mandiri yang mewadahi kedudukan dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan, serta efisiensi pengelolaan pembelajaran di tingkatan satuan pembelajaran. UU Sistem Pembelajaran Nasional Nomor. 20 tahun 2003 Pasal 56 ayat(3) menjelaskan komite sekolah/ madrasah, selaku lembaga mandiri, dibangun serta berfungsi dalam kenaikan kualitas pelayanan dengan membagikan pertimbangan, arahan serta dukungan tenaga, fasilitas serta prasarana, dan pengawasan pembelajaran pada tingkatan satuan pembelajaran. Peran dan fungsi komite sekolah merupakan sebagai penyambung antara sekolah dan orang tua dimana komite sekolah menjadi tempat untuk mengeluarkan aspirasi terkait dengan peningkatan mutu sekolah. Sebagaimana pendapat dari Rehberg (2008) yang menyatakan komite sekolah selaku badan kemitraan sekolah berusaha menampung aliansi antara sekolah, keluarga, serta masyarakat. Kemudian Santoso (2007) berpendapat bahwa komite sekolah memiliki kedudukan dalam kenaikan kualitas pembelajaran, khususnya lewat aktivitas yang cocok dengan tugas pokok serta guna komite sekolah ialah selaku penyambung antara sekolah dengan orang tua wali murid ataupun sekolah. Dalam hal menyangkut siswa komite sekolah merupakan penyambung lidah yang menerima masukan dari

masyarakat kemudian disampaikan kepada pihak sekolah. Seperti Mustadi, et.al, (2019) menyatakan fungsi yang dijalankan oleh komite sekolah secara mandiri dan profesional tidak boleh mengesampingkan masukan, kritik, saran ataupun aspirasi dari masyarakat.

Hasil observasi pada sekolah di SMPN 21 Tanjung Jabung Timur bahwa Komite sekolah di SMPN 21 ini peran dan fungsi komite sekolahnya belum secara optimal. Di mana pandangan masyarakat tentang komite sekolah hanya berkontribusi pada saat penggalangan dana atau sumbangan diperlukan. Namun pada dasarnya komite sekolah mempunyai peran dan fungsi yang tidak hanya sebatas dalam penggalangan dana saja. Komite sekolah memiliki peran dan fungsi yang sudah diatur pada peraturan Mendiknas No. 044/U/2002. Kemudian komite sekolah di SMPN 21 ini masih tidak begitu aktif dalam tiap hal karena sulitnya mengajak dan mendorong orang tua ataupun masyarakat ikut berpartisipasi pada komite sekolah karena dengan kesibukan masing-masing.

Komite sekolah merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan mutu pendidikan di sebuah sekolah. Peran dan fungsi komite sekolah dapat sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pengembangan sekolah secara efektif. Maka berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan peneliti pada latar belakang diatas ditemukan rumusan masalah Bagaimana peran dan fungsi komite sekolah yang ada di SMPN 21 Tanjung Jabung Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti temukan dalam penelitian ini memiliki tujuan, yaitu: untuk mengetahui peran dan fungsi komite sekolah yang ada di SMP Negeri 21 Tanjung Jabung Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas penelitian ini memiliki manfaat seperti:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk sekolah sebagai sumber referensi dan acuan yang bisa membuat informasi teoritis serta empiris terhadap peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut, serta dapat menambah sumber referensi yang sudah ada.

2. Manfaat praktis

- a. Terhadap Universitas hasil penelitian tersebut bisa bermanfaat sebagai acuan dan dijadikan sebagai bahan pustaka untuk peneliti selanjutnya.

- b. Terhadap lingkungan sekolah terutama SMPN 21 Tanjung Jabung Timur adalah bahwa dengan penelitian tersebut bisa memberikan kontribusi nyata komite sekolah dalam membantu meningkatkan mutu sekolah.
- c. Terhadap peneliti, dapat menambah pengetahuan tentang peran dan fungsi komite sekolah sebagai mitra dalam peningkatan mutu sekolah.